

**ANALISIS *FRAMING* PEMBERITAAN PENULISAN ULANG SEJARAH INDONESIA
PADA MEDIA *ONLINE KOMPAS.COM* DAN *ANTARANEWS.COM* PERIODE MEI –
SEPTEMBER 2025**

Nabila Ma'ratunisa, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani
abilmaratunisa@gmail.com

Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 746407
Faksimile (024) 746504 Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> / Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the differences in news framing regarding the rewriting of Indonesian history in two national online media outlets, Kompas.com and AntaraNews.com, during the period of May to September 2025. Employing a qualitative approach within a constructivist paradigm, this research applies Robert Entman's framing analysis model, which encompasses four key elements: define problems, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. Data were collected from 20 purposively selected news articles from both media outlets and analyzed in depth to identify patterns of meaning construction. The findings reveal that Kompas.com underwent a framing shift from informative to critical, emphasizing potential bias, the politicization of historical narratives, and the risk of obscuring human rights violations, while also presenting perspectives from academics and civil society as counterweights. In contrast, AntaraNews.com consistently framed the issue as a legitimate national agenda and state policy, positioning the government as the primary actor and portraying public controversy as a misunderstanding resolvable through institutional mechanisms. These differences affirm that media do not operate neutrally but actively construct social reality and shape public understanding of the relationship between history, power, and justice.

Keywords; *Rewriting Indonesian history; media; framing; Kompas.com. AntaraNews.com.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perbedaan pembedaan (*framing*) pemberitaan mengenai isu penulisan ulang sejarah Indonesia pada dua media daring nasional, yakni *Kompas.com* dan *AntaraNews.com*, selama periode Mei hingga September 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menerapkan model analisis *framing* Robert Entman yang mencakup empat elemen utama, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (menentukan penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat pertimbangan moral) dan *treatment recommendation* (menentukan penyelesaian). Data diperoleh dari 20 artikel berita yang dipilih secara purposif dari kedua media dan dianalisis secara mendalam guna mengidentifikasi pola konstruksi makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Kompas.com* mengalami pergeseran *framing* dari informatif menuju kritis, dengan menonjolkan potensi bias, politisasi narasi sejarah, dan risiko pengaburan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta menghadirkan perspektif akademisi dan masyarakat sipil sebagai pengimbang. Sebaliknya, *AntaraNews.com* secara konsisten membingkai isu ini sebagai agenda nasional yang wajar dan

bagian dari kebijakan negara, dengan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, serta memposisikan polemik publik sebagai kesalahpahaman yang dapat diselesaikan melalui mekanisme institusional. Perbedaan ini mempertegas bahwa media tidak beroperasi secara netral, melainkan berperan aktif dalam mengonstruksi realitas sosial dan membentuk cara publik memahami relasi antara sejarah, kekuasaan, dan keadilan.

Kata kunci; Penulisan ulang sejarah Indonesia; media; *framing*; *Kompas.com*. *AntaraNews.com*.

PENDAHULUAN

Sejarah berperan penting dalam pembentukan identitas bangsa dan kesadaran kolektif masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sejarah berfungsi untuk memperkuat rasa kebangsaan di tengah keberagaman etnis dan budaya (Rulianto, 2018). Namun, historiografi tidak pernah sepenuhnya netral karena penulisan sejarah sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi tertentu (Kuntowijoyo, 2001). Dalam negara pascakolonial seperti Indonesia, sejarah kerap digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan untuk membentuk identitas nasional dan memperkuat otoritas negara (Nordholt dkk., 2008).

Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mengagas proyek

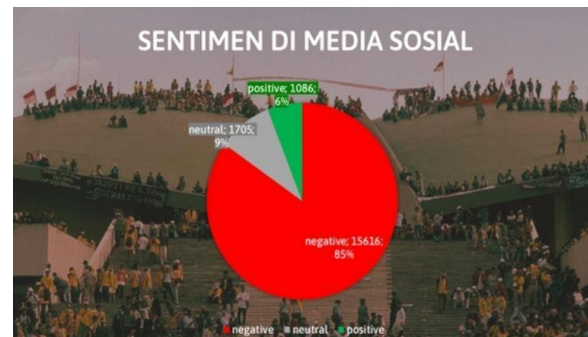
penulisan ulang sejarah Indonesia yang direncanakan terbit pada 17 Agustus 2025. Pemerintah menyebut bahwa proyek ini bertujuan untuk memperbarui narasi sejarah nasional agar lebih Indonesia-sentris, menghilangkan bias kolonial, dan relevan bagi generasi muda. Namun, proyek tersebut memicu perdebatan publik karena dinilai berpotensi menghadirkan narasi tunggal sejarah negara. Kritik muncul dari akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil, terutama terkait kemungkinan penghilangan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti tragedi 1965-1966 dan kerusuhan Mei 1998.

Kontroversi semakin berkembang setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon meragukan adanya pemerksaan massal dalam peristiwa Mei 1998. Pernyataan

tersebut menuai kritik dari akademisi, aktivis HAM, dan Komnas Perempuan karena dianggap mengabaikan fakta sejarah yang telah terdokumentasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia tidak hanya menjadi persoalan akademik, tetapi juga arena perebutan memori kolektif dan legitimasi politik (Trouillot, 1995).

Perdebatan tersebut kemudian berkembang luas di media daring nasional. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk realitas sosial melalui proses seleksi isu, penonjolan fakta, dan penentuan sudut pandang tertentu (Herman & Chomsky, 2011). Berdasarkan analisis sentimen media sosial yang dipublikasikan oleh Binokular Media Monitoring, sekitar 85 persen percakapan publik mengenai proyek ini bernada negatif, yang menunjukkan bahwa polemik ini telah berkembang menjadi isu publik yang memunculkan ketidakpercayaan

masyarakat terhadap proses penyusunan sejarah nasional.



Gambar 1. Sentimen di Media Sosial terkait Penulisan Ulang Sejarah Indonesia (Sumber: binokular.net)

Penelitian ini memilih *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* sebagai objek penelitian karena keduanya memiliki karakteristik dan latar ideologis yang berbeda. Berdasarkan laporan Reuters Institute *Digital News Report 2025*, *Kompas.com* tercatat sebagai media daring dengan tingkat akses tertinggi kedua di Indonesia dengan proporsi 37 persen pengguna mingguan, sekaligus menjadi media yang paling aktif memberitakan isu penulisan ulang sejarah Indonesia selama periode Mei hingga September 2025 dengan 173 artikel. *Kompas.com* juga dikenal mengedepankan nilai humanisme dengan

menghadirkan berbagai perspektif dan menempatkan isu dalam ruang diskusi publik (Muthaqin dkk., 2021). Sementara itu, *AntaraNews.com* dipilih karena posisinya sebagai bagian dari *Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA* yang berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berperan sebagai penyedia informasi resmi pemerintah. Perbedaan karakter kedua media ini menjadikannya relevan untuk dibandingkan dalam melihat bagaimana isu penulisan ulang sejarah Indonesia dibingkai dari dua orientasi media yang berbeda.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan melihat perbedaan bentuk pembingkai yang dilakukan oleh *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia pada periode bulan Mei hingga September 2025.

KERANGKA TEORITIS

Media Framing Theory

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* Robert Entman untuk melihat bagaimana media membingkai isu penulisan ulang sejarah Indonesia. *Framing* merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membangun makna dalam sebuah pemberitaan (Entman, 1993). *Framing* bekerja melalui empat elemen utama yang masing-masing memiliki fungsi analitis tersendiri dalam membedah konstruksi pemberitaan.

Pertama, *define problems*, yaitu tahapan identifikasi masalah yang dilakukan dengan menganalisis bagaimana *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* menginterpretasikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Kedua, *diagnose causes*, yaitu tahapan diagnosis teks untuk mengetahui penyebab munculnya masalah dalam pembingkai, meliputi apa peristiwa yang terjadi dan siapa yang dianggap menjadi sumber masalah dalam proyek tersebut. Ketiga, *make moral judgement*, yaitu tahapan

penilaian moral dalam bentuk argumen untuk melegitimasi pembungkaman yang dilakukan oleh jurnalis *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* dalam pemberitaan penulisan ulang sejarah Indonesia. Keempat, *treatment recommendation*, yaitu tahapan analisis terhadap penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh masing-masing media terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Melalui keempat elemen tersebut, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk cara khalayak memahami suatu peristiwa. Dalam konteks penelitian ini, *framing* digunakan untuk melihat bagaimana kedua media mendefinisikan polemik penulisan ulang sejarah Indonesia, menentukan aktor yang dianggap menjadi penyebab masalah, memberikan penilaian moral terhadap kontroversi yang muncul, serta menawarkan solusi atas polemik tersebut.

Media sebagai Konstruksi Realitas

Media massa tidak dapat dipahami sebagai saluran informasi yang sepenuhnya netral. Realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan Masyarakat (Berger & Luckmann, 2011). Dalam konteks media, proses konstruksi tersebut dilakukan melalui pemilihan isu, penggunaan narasumber, penekanan fakta tertentu, serta penyusunan narasi dalam pemberitaan.

Melalui proses tersebut, media berperan dalam membentuk pemahaman publik terhadap suatu peristiwa. Pemberitaan mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia tidak hanya menghadirkan fakta, tetapi juga memproduksi makna tertentu mengenai relasi antara sejarah, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, media memiliki posisi penting dalam membangun persepsi publik terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Ideologi Media dan Relasi Kekuasaan

Pemberitaan media dipengaruhi oleh latar ideologis dan posisi media dalam

struktur sosial maupun politik. Media memiliki kemungkinan dipengaruhi oleh kelompok berkekuatan politik dan ekonomi sehingga pemberitaan yang dihasilkan tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan tertentu (Herman & Chomsky, 2011). Dalam praktiknya, media dapat berfungsi sebagai arena kritik terhadap kekuasaan maupun sebagai saluran legitimasi kebijakan negara.

Dalam penelitian ini, *Kompas.com* dipahami sebagai media yang mengedepankan nilai humanisme dan ruang diskusi publik dengan menghadirkan berbagai perspektif dalam pemberitaan (Muthaqqin dkk., 2021). Sementara itu, *AntaraNews.com* sebagai bagian dari *Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA* memiliki kedekatan dengan struktur negara dan berfungsi sebagai penyedia informasi resmi pemerintah. Perbedaan karakter media tersebut memungkinkan munculnya konstruksi dan

framing yang berbeda terhadap isu penulisan ulang sejarah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis *framing* pemberitaan penulisan ulang sejarah Indonesia pada media daring *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* periode Mei hingga September 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan dan konstruksi realitas yang dibentuk media melalui teks pemberitaan.

Penelitian ini berada dalam paradigma konstruktivisme yang memandang berita bukan sebagai cerminan realitas yang sepenuhnya objektif, melainkan hasil konstruksi media melalui proses seleksi isu, pemilihan narasumber, penggunaan bahasa, dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa (Berger & Luckmann, 2011). Dalam konteks penelitian ini, pemberitaan mengenai penulisan ulang sejarah Indonesia

dipahami sebagai hasil konstruksi media yang dipengaruhi oleh sudut pandang dan karakter masing-masing media.

Data penelitian berupa data kualitatif yang bersumber dari artikel berita *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* yang dipublikasikan selama periode Mei hingga September 2025. Data tersebut mencakup judul berita, *lead*, isi berita, kutipan narasumber, pilihan diksi, serta elemen visual yang berkaitan dengan pemberitaan penulisan ulang sejarah Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur narasi berita, penekanan isu, penggunaan bahasa, serta konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan tersebut (Alaslan, 2023).

Objek penelitian terdiri atas 20 artikel berita yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, masing-masing 10 artikel dari *Kompas.com* dan 10 artikel dari *AntaraNews.com*. Pemilihan artikel didasarkan pada relevansi berita dengan isu

penulisan ulang sejarah Indonesia, terutama pemberitaan yang membahas polemik sejarah, objektivitas penulisan, isu HAM, serta respons pemerintah dan masyarakat sipil terhadap proyek tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis *framing* Robert Entman terhadap pemberitaan penulisan ulang sejarah Indonesia di *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* periode Mei-September 2025, ditemukan perbedaan pada keempat elemen *framing*. Pada elemen *define problems*, *Kompas.com* memandang penulisan ulang sejarah sebagai kebutuhan pembaruan historiografi yang sah, tetapi sekaligus berpotensi menyimpang dari objektivitas akademik serta mengarah pada pengaburan pelanggaran HAM. Berbeda dengan itu, *AntaraNews.com* memandang penulisan ulang sejarah semata sebagai agenda nasional yang penting untuk memperbarui historiografi Indonesia dan memperkuat identitas kebangsaan.

Pada elemen *diagnose causes*, *Kompas.com* menilai kontroversi muncul akibat kemungkinan intervensi politik, lemahnya transparansi, minimnya pelibatan akademisi independen, serta adanya kekhawatiran terhadap dominasi negara dalam penyusunan sejarah. Sementara itu, *AntaraNews.com* memandang polemik yang berkembang sebagai akibat dari kesalahpahaman publik, kurang optimalnya komunikasi pemerintah, serta proses penyusunan yang masih berjalan dan belum final.

Pada elemen *make moral judgement*, *Kompas.com* menempatkan objektivitas ilmiah, independensi akademik, dan keadilan historis bagi korban HAM sebagai nilai utama yang harus dijaga dalam historiografi nasional. Sebaliknya, *AntaraNews.com* memposisikan pemerintah dan DPR sebagai aktor yang sah dan bertanggung jawab dalam menjalankan proyek penulisan sejarah

nasional demi kepentingan generasi mendatang.

Adapun pada elemen *treatment recommendation*, *Kompas.com* menekankan perlunya transparansi yang lebih luas, pelibatan akademisi independen, uji publik yang substantif, serta pengawasan terhadap negara agar sejarah tidak menjadi alat legitimasi politik, sedangkan *AntaraNews.com* merekomendasikan agar penulisan ulang sejarah tetap dilanjutkan melalui mekanisme institusional negara dengan pengawasan DPR, klarifikasi pemerintah, serta proses akademik resmi. Berdasarkan keempat elemen *framing* tersebut, ditemukan beberapa kecenderungan framing sebagai berikut:

1. Penulisan Ulang Sejarah sebagai Agenda yang Wajar

Pada fase awal pemberitaan, kedua media sama-sama memandang penulisan ulang sejarah Indonesia sebagai bentuk pembaruan

historiografi nasional yang diperlukan untuk menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman. Kedua media juga menempatkan proyek tersebut sebagai isu nasional yang penting karena berkaitan dengan identitas bangsa dan memori kolektif masyarakat Indonesia.

Namun demikian, *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* membangun penekanan yang berbeda dalam memaknai pembaruan tersebut. *Kompas.com* lebih menyoroti aspek akademik dan metodologis dalam proses penulisan sejarah, sedangkan *AntaraNews.com* lebih menempatkan proyek tersebut sebagai bagian dari agenda negara yang sah dan perlu dijalankan.

2. *Kompas.com* Menekankan Objektivitas Akademik dan Potensi Politisasi Sejarah

Dalam pemberitaannya, *Kompas.com* cenderung membingkai penulisan ulang sejarah sebagai proyek yang perlu diawasi secara kritis agar tidak menyimpang dari prinsip objektivitas ilmiah. Hal ini terlihat dari dominasi narasumber akademisi, arkeolog, sejarawan, dan masyarakat sipil yang menyoroti risiko pengaburan sejarah apabila negara terlalu dominan dalam menentukan narasi sejarah nasional.

Kompas.com juga menyoroti beberapa persoalan, seperti proses penyusunan yang dianggap tergesa-gesa, minimnya pelibatan akademisi independen, hingga kontroversi mengenai kemungkinan penghilangan narasi pelanggaran HAM berat dalam sejarah Indonesia. Dalam *framing* ini, negara diposisikan sebagai aktor yang perlu diawasi karena memiliki potensi

menggunakan sejarah sebagai alat legitimasi politik. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa *Kompas.com* membangun konstruksi sejarah sebagai ruang diskusi publik yang harus terbuka terhadap kritik, transparansi, dan keberagaman perspektif.

3. *AntaraNews.com* Menekankan Legitimasi Negara dan Mekanisme Institusional

Berbeda dengan *Kompas.com*, *AntaraNews.com* lebih membingkai penulisan ulang sejarah sebagai kebijakan nasional yang dijalankan melalui mekanisme resmi negara. Pemberitaan *AntaraNews.com* lebih banyak menggunakan narasumber dari pemerintah, DPR, dan lembaga negara yang menekankan bahwa proyek penulisan ulang sejarah dilakukan secara akademik dan tetap

berada dalam pengawasan institusional.

Kontroversi yang muncul di ruang publik diposisikan sebagai akibat dari kesalahpahaman publik atau proses penyusunan yang belum selesai. Dalam *framing* ini, negara dipandang sebagai aktor yang sah dan bertanggung jawab dalam mengelola historiografi nasional. *AntaraNews.com* juga lebih menonjolkan klarifikasi pemerintah terhadap berbagai kritik yang berkembang, termasuk mengenai polemik "tone positif" dan kontroversi penghapusan narasi pemerkosaan massal Mei 1998. Dengan demikian, media ini membangun konstruksi bahwa polemik yang muncul perlu diselesaikan melalui mekanisme formal negara, bukan melalui tekanan opini publik semata.

4. Perbedaan *Framing* yang Signifikan pada Isu Pelanggaran HAM dan Tragedi Mei 1998

Perbedaan *framing* antara kedua media semakin terlihat ketika pemberitaan mulai berkaitan dengan isu pelanggaran HAM, khususnya tragedi pemerkosaan massal Mei 1998. *Kompas.com* lebih menempatkan isu tersebut dalam kerangka moral dan keadilan historis dengan menghadirkan kritik dari aktivis HAM, akademisi, dan masyarakat sipil terhadap kemungkinan penghilangan narasi korban dalam sejarah nasional.

Dalam *framing Kompas.com*, pengingkaran terhadap tragedi Mei 1998 dipandang sebagai bentuk pengaburan sejarah yang berpotensi menghilangkan pengalaman korban dari memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, media ini menekankan

pentingnya objektivitas sejarah dan pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM. Sebaliknya, *AntaraNews.com* lebih membingkai polemik tersebut dalam kerangka klarifikasi pemerintah dan stabilitas institusional. Kritik publik terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan diposisikan sebagai bagian dari dinamika yang perlu dijawab melalui mekanisme resmi seperti klarifikasi pemerintah dan pengawasan DPR.

5. *Framing* Kedua Media dipengaruhi oleh Orientasi dan Posisi Ideologis Media

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan *framing* antara *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* tidak hanya terletak pada isi pemberitaan, tetapi juga pada orientasi ideologis dan posisi struktural masing-masing media. *Kompas.com* cenderung menjalankan

fungsi kontrol sosial dengan menempatkan negara sebagai objek pengawasan publik serta membuka ruang kritik dari akademisi dan masyarakat sipil. Sementara itu, *AntaraNews.com* lebih menjalankan fungsi legitimasi institusional dengan menempatkan negara sebagai aktor utama yang memiliki otoritas dalam mengelola sejarah nasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa media tidak bersifat netral dalam memberitakan suatu peristiwa. Realitas yang diterima publik merupakan hasil konstruksi media melalui proses seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, dan pemilihan narasumber sesuai dengan kepentingan dan orientasi media masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis *framing* terhadap pemberitaan penulisan ulang sejarah

Indonesia pada *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* periode Mei-September 2025, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media membangun konstruksi realitas yang berbeda terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Perbedaan tersebut terlihat pada cara media menentukan fokus isu, memilih narasumber, memaknai polemik yang berkembang, hingga menawarkan solusi terhadap persoalan yang muncul.

Kompas.com menunjukkan pola *framing* yang dinamis seiring berkembangnya intensitas kontroversi. Pada awal pemberitaan, penulisan ulang sejarah dibingkai sebagai kebutuhan pembaruan historiografi nasional yang wajar dan penting dilakukan untuk menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan zaman. Namun, seiring munculnya polemik mengenai objektivitas sejarah, konsep "*tone positif*", hingga isu pelanggaran HAM, *framing* *Kompas.com* bergeser menjadi lebih kritis dengan menempatkan penulisan ulang

sejarah sebagai persoalan politik memori dan potensi intervensi kekuasaan terhadap historiografi nasional. Dalam konstruksi ini, negara diposisikan sebagai aktor yang perlu diawasi karena berpotensi memengaruhi narasi sejarah melalui dominasi dalam proses penyusunan.

Sebaliknya, *AntaraNews.com* menunjukkan pola *framing* yang relatif konsisten dan berorientasi institusional. Sebagai bagian dari Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA yang berada dalam struktur negara, *AntaraNews.com* membingkai penulisan ulang sejarah sebagai agenda nasional yang sah dan perlu dijalankan melalui mekanisme resmi pemerintah. Polemik yang berkembang lebih banyak diposisikan sebagai kesalahpahaman publik, persoalan komunikasi, atau dinamika yang wajar dalam proses penyusunan kebijakan negara. Dalam pemberitaannya, negara dan DPR diposisikan sebagai aktor yang rasional, bertanggung jawab, dan

memiliki legitimasi dalam mengelola historiografi nasional melalui prosedur formal dan mekanisme kelembagaan.

Perbedaan *framing* antara kedua media tidak hanya terletak pada arah legitimasi, tetapi juga pada keseluruhan konstruksi realitas yang dibangun. *Kompas.com* cenderung menghadirkan perspektif akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil dengan menekankan pentingnya objektivitas ilmiah, transparansi, serta pengakuan terhadap korban pelanggaran HAM. Hal tersebut menunjukkan posisi *Kompas.com* sebagai arena diskursus publik yang reflektif, kritis, dan evaluatif terhadap kebijakan negara. Sementara itu, *AntaraNews.com* lebih dominan menggunakan sumber resmi pemerintah dan membingkai polemik sebagai isu yang dapat diselesaikan melalui klarifikasi serta mekanisme formal negara. Karakter pemberitaan tersebut memperlihatkan fungsi *AntaraNews.com* sebagai media penyampai

informasi resmi negara yang bersifat informatif, klarifikatif, dan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemberitaan media tidak merepresentasikan realitas secara sepenuhnya objektif, melainkan merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh orientasi, posisi struktural, dan kepentingan masing-masing media. Dalam konteks penulisan ulang sejarah Indonesia, *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* membangun representasi yang berbeda terhadap isu yang sama, sehingga pemaknaan publik mengenai sejarah, kekuasaan, dan memori kolektif sangat dipengaruhi oleh media yang mereka konsumsi.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa *framing* media berperan penting dalam membentuk konstruksi realitas terhadap isu penulisan ulang sejarah Indonesia. Perbedaan

framing antara *Kompas.com* dan *AntaraNews.com* membuktikan bahwa pemberitaan media tidak sepenuhnya objektif, melainkan dipengaruhi oleh proses seleksi isu, penonjolan sudut pandang, serta orientasi media masing-masing. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga aktor yang membentuk pemaknaan publik terhadap suatu peristiwa.

Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi media massa untuk menghadirkan pemberitaan yang lebih berimbang, terutama pada isu yang berkaitan dengan sejarah, kekuasaan, dan kepentingan publik. Media diharapkan tidak hanya menonjolkan sumber resmi negara, tetapi juga memberikan ruang bagi perspektif akademisi, masyarakat sipil, dan kelompok terdampak agar informasi yang disampaikan lebih komprehensif dan reflektif.

Implikasi Sosial

Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi media dan sikap kritis masyarakat dalam mengonsumsi informasi, khususnya terkait isu kebijakan publik dan sejarah nasional. Publik perlu memahami bahwa setiap media memiliki cara pandang dan penekanan yang berbeda dalam memberitakan suatu isu, sehingga diperlukan upaya untuk membandingkan berbagai sumber informasi agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Alaslan, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (hlm. 232).

Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Open Road Media.

Entman, R. (1993). Framing: Toward Clarification of A Fractured Paradigm. *The Journal of Communication*, 43, 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

Herman, E. S., & Chomsky, N. (2011). *Manufacturing Consent: The*

Political Economy of the Mass Media. Knopf Doubleday Publishing Group.

Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar ilmu sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.

Muthaqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi Media Dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadah Di Kompas Dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 63–82.

Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Rulianto, R. (2018). Pendidikan Sejarah Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 127–134. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16527>

Trouillot, M.-R. (with Internet Archive). (1995). *Silencing the past: Power and the production of history*. Boston, Mass.: Beacon Press. <http://archive.org/details/silencingpas tpow0000trou>